

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT
PADA AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
COPPOBULU, DESA TUNGKE, KECAMATAN BENGGO,
KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

IRNASARI

M011201112



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Tingkat Ketergantungan Masyarakat pada Areal Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo,
Kabupaten Bone**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Irnasari

M011201112

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 April 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S. Hut., M. Si
NIP. 19790831200812 1 002

Maklarennu, S. Hut., M. Si., Ph. D
NIP. 19700307200812 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.
NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irnasari

Nim : M011201112

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

**“Analisis Tingkat Ketergantungan Masyarakat pada Areal Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo,
Kabupaten Bone”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 April 2024

Yang Menyatakan



Irnasari

ABSTRAK

Irnasari (M011201112), Analisis Tingkat Ketergantungan Masyarakat pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah bimbingan Muhammad Alif K Sahide dan Makkarennu.

Hutan kemasyarakatan (HKm) telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan. Salah satu desa yang telah memiliki izin kelola hutan kemasyarakatan adalah Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap areal Hutan Kemasyarakatan Coppobulu dan mengidentifikasi aset penghidupan berdasarkan 5 modal yaitu modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik dan modal sosial serta strategi penghidupan berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis tingkat ketergantungan dengan menggunakan rumus kontribusi dan analisis *livelihood*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat pada areal izin HKm dalam setahun sebesar 36% dan dari luar pengelolaan HKm dalam setahun sebesar 64%. Masyarakat Desa Tungke masih banyak mengelola komoditi dari luar areal HKm dibandingkan dengan pengelolaan dalam areal HKm karena permintaan harga pasar terhadap hasil yang diperoleh dari luar areal HKm (jagung dan padi) lebih stabil dan tinggi sehingga mempengaruhi pendapatan. Selain itu, masih banyak komoditi yang baru mulai dikembangkan oleh masyarakat sehingga belum memberikan manfaat secara ekonomi. Modal yang paling tinggi pengaruhnya dalam mendorong masyarakat memperoleh mata pencaharian yang layak yaitu modal fisik dan modal yang berada pada kategori sedang yaitu modal manusia, modal alam, modal sosial, dan modal finansial. Strategi penghidupan berkelanjutan yang dilakukan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi serta migrasi.

Kata Kunci: Tingkat Ketergantungan, Hutan Kemasyarakatan, *Livelihood*

Community forestry (HKm) has provided benefits to the community and maintained forest sustainability. One of the villages that has a community forest management license is Tungke Village, Bengo District, Bone Regency. This study aims to analyze the level of community dependence on the Coppobulu Community Forest area and identify livelihood assets based on 5 capitals, namely human capital, natural capital, financial capital, physical capital and social capital as well as sustainable livelihood strategies. The research was conducted using dependency level analysis using the contribution formula and livelihood analysis. The results showed that the level of community dependence on the HKm permit area in a year was 36% and from outside HKm management in a year was 64%. The Tungke Village community still manages many commodities from outside the HKm area compared to management within the HKm area because the market price demand for products obtained from outside the HKm area (corn and rice) is more stable and high, thus affecting income. In addition, there are still many commodities that are just starting to be developed by the community so that they have not yet provided economic benefits. The capital that has the highest influence in encouraging the community to obtain a decent livelihood is physical capital and capital that is in the medium category is human capital, natural capital, social capital, and financial capital. Sustainable livelihood strategies include intensification and extensification, diversification and migration.

Keyword: Level of dependency, Community forestry, *Livelihood*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Tingkat Ketergantungan Masyarakat Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan inspirasi dan petunjuk kepada penulis dalam menjalani setiap langkah kehidupan.

Skripsi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Almarhum **Muh. Nasir** dan Ibunda **Norma** yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan perhatiannya selama mengerjakan skripsi ini. Terkhusus Kakak terhebat **Kopda Basri, Nuri Meidiani Hanafi** dan **Ardi Ansa** serta keluarga besar penulis yang senantiasa menasehati, memberikan perhatian dan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si** dan Ibu **Makkarenu, S.Hut., M.Si., Ph.D** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Supratman, S.Hut., M.P** dan Bapak **Chairil A., S.Hut., M.Hut** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat berarti bagi pengembangan skripsi ini.
3. Dekan fakultas kehutanan Bapak **Dr. Ir. A. Mujetahid M., S. Hut., M. P., IPU**, Ketua program studi kehutanan Ibu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.** Dosen penasihat akademik Ibu **Makkarenu, S.Hut., M.Si., Ph.D**, Bapak/Ibu **Dosen Pengajar** dan **Staf Pegawai Fakultas Kehutanan** yang telah

membantu, memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga serta memudahkan penulis dalam pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan.

4. Masyarakat **Desa Tungke** yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian ini dan terkhusus Bapak **Ramang** selaku Kepala Dusun Coppobulu yang sangat membantu penulis dalam melakukan pengambilan data.
5. Keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus **Minat Sosial** yang menjadi tempat penulis menemukan banyak inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar **Imperium** yang selalu membantu selama proses perkuliahan dan terkhusus **Amriani** yang senantiasa membantu dalam pengambilan data.
7. Teman seperjuangan **Nur Amalia, Jumarlia, Defi Safitri, Ramlah, dan Nur Inayah Putri Naila** yang selalu memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
8. Keluarga besar **SOTTA TM** yang selalu menjadi inspirasi melalui dukungan moril yang tak terbatas kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doa demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 18 April 2024



Irnasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm)	4
2.2 Hutan dan Masyarakat	6
2.3 Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan	7
2.4 Konsep <i>Livelihood</i>	8
III. METODE PENELITIAN	11
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	11
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	11
3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	12
3.4 Teknik Pengumpulan Data	12
3.5 Analisis Data	12
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Keadaan Umum Lokasi	17
4.2 Identifikasi Karakteristik Responden	17
4.3 Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Areal HKm	21
4.4 <i>Livelihood</i> Aset Kelompok Tani Hutan Coppobulu.....	22

V. PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	<i>Pentagon Asset</i>	8
Gambar 2.	Peta Desa Tungke	11
Gambar 3.	Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Areal HKm	21
Gambar 4.	<i>Pentagon Asset</i> Kelompok Tani Hutan Coppobulu	29
Gambar 5.	Persentase Strategi Penghidupan Berkelanjutan	30

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Variabel Ketergantungan	13
Tabel 2.	Indikator dan Kriteria.....	14
Tabel 3.	Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tingkat Umur.....	17
Tabel 4.	Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 5.	Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tanggungan Keluarga.....	19
Tabel 6.	Jumlah dan Persentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	20
Tabel 7.	Identifikasi Modal Manusia	23
Tabel 8.	Identifikasi Modal Alam	24
Tabel 9.	Identifikasi Modal Sosial	25
Tabel 10.	Identifikasi Modal Finansial	26
Tabel 11.	Identifikasi Modal Fisik	27
Tabel 12.	Identifikasi 5 Modal Kelompok Tani Hutan Coppobulu	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Panduan Wawancara.....	39
Lampiran 2.	Identitas Anggota Kelompok Tani Hutan Coppobulu.....	43
Lampiran 3.	Dokumentasi.....	44
Lampiran 4.	Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan Coppobulu	45
Lampiran 5.	Total Biaya Tetap Komoditi Padi (Luar Areal HKm).....	47
Lampiran 6.	Total Biaya Variabel Komoditi Padi (Luar Areal HKm)	48
Lampiran 7.	Penerimaan dan Pendapatan Padi (Luar Areal HKm).....	49
Lampiran 8.	Total Biaya Tetap Komoditi Jagung (Luar Areal HKm).....	50
Lampiran 9.	Total Biaya Variabel Komoditi Jagung (Luar Areal HKm)	51
Lampiran 10.	Penerimaan dan Pendapatan Jagung (Luar Areal HKm).....	52
Lampiran 11.	Pendapatan Komoditi Cengkeh (Dalam Areal HKm)	53
Lampiran 12.	Pendapatan Komoditi Jahe (Dalam Areal HKm)	54
Lampiran 13.	Pendapatan Komoditi Coklat (Dalam Areal HKm).....	55
Lampiran 14.	Total Biaya Tetap Komoditi Jagung (Dalam Areal HKm).....	56
Lampiran 15.	Total Biaya Variabel Komoditi Jagung (Dalam Areal HKm).....	57
Lampiran 16.	Penerimaan dan Pendapatan Jagung (Dalam Areal HKm).....	58
Lampiran 17.	Keterangan Skoring Hasil Analisis Modal Manusia	59
Lampiran 18.	Skoring Hasil Analisis Modal Manusia.....	60
Lampiran 19.	Keterangan Skoring Hasil Analisis Modal Alam	61
Lampiran 20.	Skoring Hasil Analisis Modal Alam.....	63
Lampiran 21.	Keterangan Skoring Hasil Analisis Modal Sosial	65
Lampiran 22.	Skoring Hasil Analisis Modal Sosial.....	66
Lampiran 23.	Keterangan Skoring Hasil Analisis Modal Finansial	67
Lampiran 24.	Skoring Hasil Analisis Modal Finansial	69
Lampiran 25.	Keterangan Skoring Hasil Analisis Modal Fisik	71
Lampiran 26.	Skoring Hasil Analisis Modal Fisik.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan masyarakat lokal dengan hutan sudah terjalin sejak lama, keberadaan hutan telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Mereka bergantung pada sumber daya hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun non-kayu yang memberikan nilai tambah bagi penghidupan mereka. Sumber daya hutan adalah hasil alam yang diambil dari kawasan hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu, serta meliputi tumbuhan dan satwa yang ada di dalam hutan. Beberapa dari hasil alam ini berasal dari lingkungan alam, sementara yang lain berasal dari lingkungan yang dibudidayakan manusia. Secara umum masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan (Haryani dan Rijanta, 2019). Ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan terhadap lahan dan bentuk pemanfaatan hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan (Widyaningsih dkk, 2019).

Penting untuk dipahami bahwa hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya membentuk hubungan saling membutuhkan, dan manusia memerlukan lingkungan yang sehat, lestari, indah, dan nyaman untuk mempertahankan kehidupan yang berkualitas dan produktif. Namun kelestarian lingkungan juga sangat bergantung pada kepentingan manusia dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup, termasuk hutan secara berkelanjutan. Salah satu program pemerintah dalam pengelolaan hutan secara legal adalah program hutan kemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi hutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal (Anno dkk, 2022).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan yang dikelola secara lestari dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan (Ilfa dkk, 2021). Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pilihan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk

menurunkan laju deforestasi di Indonesia melalui partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk memperkuat hak pengelolaan dan mengurangi konflik kehutanan (Sylviani dkk, 2019).

Masyarakat hutan adalah masyarakat yang tinggal di dekat hutan yang penghidupan serta lingkungannya sangat bergantung pada hutan. Salah satu masyarakat yang memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan kemasyarakatan adalah masyarakat Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), pemerintah telah menerbitkan izin pengelolaan kepada masyarakat, khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH) Coppobulu, melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH) Coppobulu dengan nomor surat keputusan yaitu sk. 10594/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/12/2019 (Margono, 2020).

Mengidentifikasi aset penghidupan (*livelihood*) masyarakat merupakan langkah penting dalam mengetahui sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Livelihood* mencakup kegiatan yang membentuk bagaimana orang hidup dan sumberdaya yang menjamin kehidupan mereka, resiko yang terlibat didalam pengelolaan sumberdaya tersebut serta kebijakan yang mendukung atau menentang dalam upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Aset penghidupan merupakan teori penghidupan aset yang berada di dalam masyarakat dengan tujuan mengetahui kondisi dan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (Jamroni & Rifdha, 2023).

Desa Tungke Kecamatan Bengo merupakan salah satu wilayah Kabupaten Bone yang mayoritas penduduknya beraktivitas di kawasan hutan. Secara umum masyarakat di wilayah tersebut masih memanfaatkan hutan dengan cara membuka lahan untuk bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan non kayu untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya program HKm bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi sejauh mana program HKm berhasil mencapai tujuan tersebut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap areal hutan kemasyarakatan Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone
2. Mengidentifikasi aset penghidupan berdasarkan 5 modal yaitu modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik dan modal sosial serta strategi penghidupan berkelanjutan.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi terkait ketergantungan masyarakat pada areal Hutan Kemasyarakatan Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti atau pihak yang membutuhkan data terkait ketergantungan masyarakat pada areal Hutan Kemasyarakatan Coppobulu, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal (meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka untuk mengambil manfaat yang optimal dan adil dari sumber daya hutan) (Sagita dkk, 2019). Hutan kemasyarakatan adalah program perhutanan sosial yang dilaksanakan didalam hutan negara dengan cara memperkuat masyarakat lokal di kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal dalam meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No P.83/MENLHK/2016 tentang Perhutanan Sosial). Salah satu hutan negara merupakan hutan lindung yang ditetapkan sebagai wilayah kerja HKm. Program HKm pada hutan lindung tidak memperbolehkan masyarakat untuk menanam tanaman dengan sistem monokultur seperti pada areal perkebunan, namun mengembangkan jenis tanaman dengan lapisan kanopi penuh seperti pada sistem kebun campuran atau agroforestri (Haikal dkk, 2020).

Hutan kemasyarakatan merupakan kolaborasi kegiatan konservasi, produksi hutan lestari, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. HKm melarang petani menanam dengan pola monokultur, namun mengarahkan mereka untuk menanam dengan pola agroforestri. Penerapan agroforestri di lahan dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia dan menjaga keberadaan hutan. Sebab, perpaduan jenis tanaman pertanian dan kehutanan ditanam dalam satu kawasan untuk menciptakan produksi berkelanjutan (Novasari dkk, 2020).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan inisiatif yang melindungi dan mengambil manfaat kawasan hutan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan. Masyarakat diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai pelaksana, namun juga sebagai kontributor dan penerima manfaat. Program HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya

hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga fungsi hutan (Anno dkk, 2022).

Hutan kemasyarakatan merupakan kolaborasi kegiatan perlindungan, produksi hutan lestari, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Novasari dkk, 2021). Selain sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi pengelolanya, HKM juga mempunyai fungsi mengatur keseimbangan ekosistem, menyediakan tempat bagi berbagai satwa dan tumbuhan liar untuk hidup dan berkembang biak, serta sebagai sumber oksigen bagi kelangsungan hidup organisme. Hutan juga mempunyai fungsi hidrologis sebagai pelindung dan penyedia sumber daya air yang penting bagi kebutuhan manusia. Hutan rakyat harus dikelola secara lestari berdasarkan prinsip konservasi ekologi. Pengelolaan hutan lestari merupakan suatu proses pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin produksi dan jasa yang diharapkan dapat terus diberikan tanpa mengorbankan fungsi hutan atau menimbulkan kerusakan lingkungan (Yasin dkk, 2021).

Program hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan, sekaligus menjamin fungsi hutan dan pelestarian lingkungan (Huzaini dkk, 2023). Hutan kemasyarakatan adalah program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bersama suatu kawasan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merasakan dampak yang signifikan. Masyarakat memiliki akses terhadap produk non-kayu dari hutan. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomiannya (Asgar, 2019).

Pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan yang bertujuan untuk integrasi masyarakat dilakukan melalui penguatan organisasi kemasyarakatan. Pengorganisasian kelompok tani hutan dapat menjadi dasar pelaksanaan program apapun di dalam kelompok. Partisipasi aktif masyarakat pada fasilitas pengelolaan kawasan hutan rakyat dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan hutan kemasyarakatan berjalan baik melalui kelompok petani hutan. Kelompok tani merupakan lembaga setingkat Gapoktan yang terlibat langsung dalam kegiatan

pengembangan usaha bersama dan menjadi tempat para anggota berinteraksi dan berkoordinasi untuk segera mencapai tujuan bersama (Asgar, 2019).

2.2 Hutan dan Masyarakat

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak aspek dan memberikan manfaat luas, terutama bagi kelangsungan hidup manusia, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di tingkat lokal hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat lokal, khususnya di negara-negara berkembang. Peran ini mencakup fungsi hutan sebagai penyedia produk dan jasa lingkungan seperti kayu bakar, makanan, obat-obatan, air, dan pakan ternak, termasuk lahan subur. Beragamnya fungsi tersebut menjadikan hutan sebagai tempat berinteraksi dan penghidupan sebagian besar masyarakat di sekitarnya (Wicaksono dkk, 2020).

Hutan merupakan sumberdaya yang menempati tempat yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengelolaan hutan secara lestari memerlukan tenaga kerja yang berkualitas, terampil secara ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan yang baik. Pemanfaatan sumber daya hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan masyarakat dan masih sangat tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar. Upaya mewujudkan konsep pengelolaan hutan lestari memerlukan keterlibatan masyarakat hutan sebagai pemangku kepentingan utama yang sering berinteraksi dengan hutan (Witno dkk, 2020).

Hutan merupakan aset alam yang diatur oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan global. Hutan bukanlah hal baru bagi masyarakat, namun masyarakat didorong untuk bertahan hidup karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendapatan bagi keluarga mereka secara berkelanjutan (Asgar, 2019).

Pemanfaatan hasil hutan di pedesaan mempunyai dua aspek sosial yang mempengaruhi keberadaan kawasan hutan. Aspek pertama, mayoritas wilayah pedesaan yang mengkonsumsi hasil hutan berasal dari kawasan hutan. Hal ini

menjadikannya sebagai titik fokus interaksi yang erat antara masyarakat dan kawasan hutan. Hubungan masyarakat dan hutan tidak hanya terletak pada pemanfaatan hasil hutan saja, namun juga terdapat interaksi simbolik yang erat dengan budaya dan tradisi (Sulham dkk, 2021).

2.3 Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan

Hubungan masyarakat lokal dengan hutan sudah terjalin sejak lama, keberadaan hutan telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Mereka bergantung pada sumber daya hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun non-kayu yang memberikan nilai tambah bagi penghidupan mereka. Masyarakat memandang hutan sebagai lahan ekonomi dan sumber berbagai kebutuhan subsisten. Pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan standar hidup daerah pedesaan di sekitar hutan. Secara umum masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan (Haryani dan Rijanta, 2019).

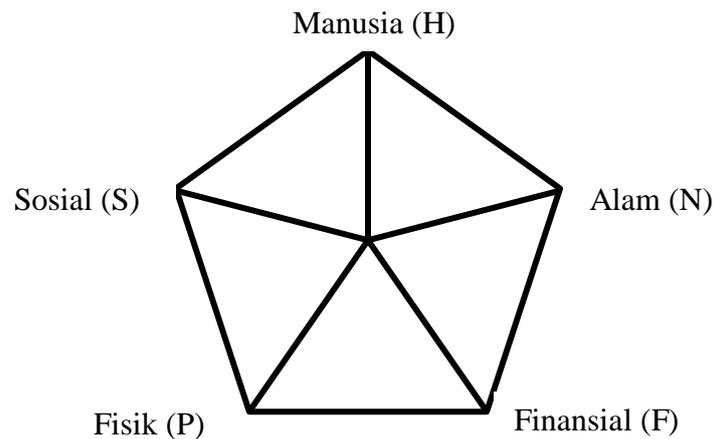
Hubungan antara masyarakat pedesaan sekitar hutan dengan kawasan hutan sangat erat terutama dalam hal perekonomian, kebutuhan gizi, dan kebutuhan kesehatan. Hutan memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk sumber energi, vitamin, mineral, dan kalori untuk kehidupan sehari-hari (Haryani dan Rijanta, 2019). Interaksi sosial antara masyarakat desa dengan hutan membuat masyarakat sekitar hutan bergantung pada sumber kehidupan pokok seperti air, sumber energi, kayu bakar dan pangan yang dihasilkan di hutan, bahan bangunan, dan sumberdaya lainnya (Fahrirurrahman dan Ratnaningsih, 2020).

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan tidak hanya terlihat pada penggunaan kayu dan produk non-kayu, namun juga pada sifat kegiatan pertanian dan pengelolaan wilayah kelola di dalam hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan ditunjukkan melalui interaksinya dengan hutan dalam bentuk pemanfaatan hutan. Interaksi dengan hutan menjelaskan dinamika situasi kependudukan akibat pertumbuhan penduduk, pendapatan dan kualitas sumber daya manusia, serta bentuk pertukaran budaya dan kearifan lokal (Widyaningsih dkk, 2019).

2.4 Konsep *Livelihood*

Livelihood adalah istilah perkembangan yang menggambarkan keterampilan, kepemilikan sumberdaya (sosial dan material), dan aktivitas yang dibutuhkan individu atau komunitas untuk bertahan hidup. *Livelihood* berarti memiliki cukup makanan dan arus kas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sederhananya, ini diartikan sebagai sarana mencari nafkah. Mata pencaharian terdiri dari keterampilan, aset, dan aktivitas yang diperlukan untuk bertahan hidup (Suryani, 2019).

Penghidupan atau *livelihood* adalah upaya atau kondisi yang mewakili keterampilan, kepemilikan, dan aktivitas yang diperlukan suatu komunitas untuk hidup. Kemampuan dan kepemilikan, disebut juga aset, terdiri dari sumber daya alam, fisik, manusia, dan keuangan yang dikelola oleh lembaga (sosial) suatu masyarakat (Pradnyaswari dkk, 2022). Penghidupan atau *livelihood* merupakan suatu aset atau modal yang terdiri dari aset manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial. Untuk menunjang kehidupan, manusia dapat menggunakan sumberdaya yang tersedia dan tidak terbatas pada satu aset saja (Izzati dkk, 2021).



Gambar 1. *Pentagon Asset*

Pentagon asset di atas menggambarkan hubungan lima aset (aset manusia, aset alam, aset sosial, aset keuangan, dan aset fisik) terhadap akses ke aset yang dimiliki. Perhitungan *pentagon asset* menggunakan rata-rata nilai aset hidup setiap masyarakat (Saputra dkk, 2019). Kelima indikator aset penghidupan dalam *pentagon asset* memiliki aspek yang berbeda-beda yaitu (Rohmah, 2019):

1. Modal Manusia (*Human Capital*)

Pendekatan penghidupan berfokus terutama pada masyarakat sebagai isu utama. Modal manusia mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap lingkungan hidup (Rohmah, 2019). Indikator yang diukur adalah pendidikan, kesehatan, dan keterampilan (Gai dkk, 2020).

2. Modal Alam (*Natural Capital*)

Manusia mempunyai modal alam yang dapat dimanfaatkannya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Modal alam berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya (Rohmah, 2019). Indikator yang diukur dalam modal alam adalah luas lahan, bahan baku, kepemilikan tanah, dan sumber daya air (Gai dkk, 2020).

3. Modal Keuangan (*Financial Capital*)

Modal keuangan adalah sumberdaya keuangan yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupannya, termasuk cadangan dan saham milik dirinya atau lembaga keuangan (Rohmah, 2019). Indikator yang diukur dalam modal finansial meliputi sumber pendapatan, pendapatan, tabungan, dan utang (Gai dkk, 2020).

4. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan hidup masyarakat. Sumberdaya sosial umumnya tidak berwujud dan tidak mudah diukur, namun memberikan manfaat bagi masyarakat (Rohmah, 2019). Indikator yang diukur dalam modal sosial adalah kepercayaan kelompok, keharmonisan kelompok, aktivitas kelompok, organisasi komunitas, jaringan sosial, dan partisipasi (Gai dkk, 2020).

5. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal fisik merupakan infrastruktur dan fasilitas dasar yang mendukung proses penghidupan masyarakat lokal. Penguasaan atas sumberdaya fisik merupakan contoh aksesibilitas yang membantu rumah tangga bertahan hidup (Rohmah, 2019). Indikator yang diukur dengan modal fisik meliputi kondisi fisik rumah, akses terhadap peralatan komunikasi, akses jalan, aset publik, dan alat transportasi (Gai dkk, 2020).

Kegiatan penghidupan berkelanjutan adalah strategi penghidupan dalam bentuk keputusan berdasarkan prioritas dan peluang dalam penggunaan aset untuk mempertahankan tujuan penghidupan. Syahputri dkk, (2023) mengelompokkan strategi mata pencaharian dibagi menjadi tiga kategori antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi, dan migrasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu tetap bertahan pada mata pencaharian semula, intensifikasi diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dengan meningkatkan produktivitas serta cara kerja, sedangkan ekstensifikasi upaya pada produksi. Diversifikasi melibatkan upaya lain, seperti mencari pekerjaan lain atau pekerjaan paruh waktu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka merasa pekerjaan sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Migrasi adalah mencari pekerjaan di luar daerah tempat tinggalnya untuk mencari nafkah.